

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
SALIMBATU KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
KABUPATEN BULUNGAN**



Diajukan Oleh : Muhammad Ishar
NPM : 20205104
Angkatan Periodek Mahasiswa : 2020
Dosen Pembimbing Proposal : Imam Muazansyah, S.E., M.I.P.

Praproposal ini sudah diperiksa dan layak untuk diajukan ke tahapan ***SEMINAR JUDUL***.

Tanjung Selor, 14 Mei, 2024.

Imam Muazansyah, S.E., M.I.P
NIDN : 1114027903

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TAHUN
2024**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Partisipasi	5
2.2 Masyarakat	7
2.3 Pembangunan	9
2.4 Hubungan partisipasi dengan Masyarakat	10
2.5 Desa.....	11
2.6 Otonomi daerah.....	12
2.7 Kerangka Berpikir.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan waktu penelitian.....	16
3.2 Jenis penelitian	16
3.3 Populasi	16
3.4 Sumber data.....	17
3.5 Teknik pengumpulan data	17
3.6 Validitas data	18
3.7 Teknik analisis data	20
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas menuju keadaan yang lebih baik. Dengan mendayagunakan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan, sedangkan potensi manusia perlu ditingkatkan pengetahuannya termasuk pengetahuan tentang pembangunan.

Demikian halnya dengan pembangunan desa dan masyarakat pedesaan adalah suatu proses perubahan dan pembaharuan berlangsung di desa dan dalam berkehidupan masyarakat yang sedang berjalan, yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa agar dapat hidup secara layak dan sejahtera.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 BAB XI tentang Pemerintah Desa menyebutkan bahwa :

1. Dalam pemerintah daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
2. Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.

3. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai asal usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan perda. Kemudian pasal 202 dan 203 yang berbunyi:

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Hakikat pembangunan adalah pembangunan masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu mempelajari sejarah bangsa-bangsa. Kita perlu memahami pembangunan baik dari sisi input (modal) pembangunan maupun dari proses dan tujuan pembangunan, yaitu perekonomian yang baik, masyarakat yang baik dan proses politik yang baik.

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa didunia ini. Pembangunan sarana dan prasarana desa sangat berkaitan erat dengan pembangunan desa, begitu juga dengan halnya pada Desa Salimbatu

Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. Karena ketersediaan sarana dan prasarana desa akan sangat berhubungan dengan proses produksi, konsumsi dan distribusi ekonomi masyarakat yang kesemuanya ini tentu memerlukan perencanaan dan koordinasi yang matang agar terciptanya pembangunan sarana dan prasarana benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, dengan demikian partisipasi masyarakat pada pembangunan perlu ditingkatkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti aparat desanya. Pada dasarnya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan hal penting dalam pembangunan suatu desa. Secara spesifik partisipasi adalah konsultasi dengan bawahan atau kelompok lain yang terkena oleh keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusan, hal ini didasari pada motivasi dan individu-individu dalam masyarakat untuk berpartisipasi. Tanpa adanya motivasi sebagai penggerak dalam diri individu tersebut, maka partisipasi dalam masyarakat tidak akan berjalan baik. Kata motivasi berarti motif atau hal yang menyangkut dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan orang untuk bertindak dengan cara tertentu.

Pada hakekatnya partisipasi itu adalah keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat, karena tanpa adanya respon dari suatu masyarakat semua kegiatan pelaksanaan yang dilakukan tidak akan terlaksana terutama menyangkut masalah pembangunan, partisipasi sangat mempengaruhi suatu proses kegiatan yang mana partisipasi ini juga menentukan keberhasilan suatu

masyarakat untuk berpartisipasi sesama masyarakat agar mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam bentuk uang, tenaga (gotong royong), pikiran (ide-ide, gagasan). Menurut Alex Nitisemito dalam Syaprizal (2008:15).

Partisipasi dalam hal pembangunan desa sangat penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakatnya suatu pembangunan tidak akan sempurna.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Mempertajam pengetahuan mengenai ilmu sosial terutama ilmu administrasi negara.
- b. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pemerintah Desa Salimbatu sebagai bahan masukan informasi dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih berskala prioritas serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap seluruh proses pembangunan.
- c. Sebagai bahan informasi tambahan bagi pihak lain yang ada relevansinya.
- d. Sebagai tambahan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theresia et all 2015 : 196) Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, Partisipasi berarti ikut serta dalam mengikuti dan menyertai suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri

Angell dalam Ross (1967:130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan

norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh Masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Menurut Windardi dalam Wiguna(2014:31) partisipasi adalah turut serta seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan dan orang tersebut melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut.

Seperti dimaklumi dalam kegiatan atau aktivitasnya tujuan masyarakat, baru akan tercapai apabila ada partisipasi anggotanya, sebab dalam partisipasi terdiri atas :

1. Partisipasi dapat dipaksakan dan dapat pula suka rela.
2. Partisipasi dapat formal dan informal.
3. Partisipasi dapat bersifat langsung dan bisa bersifat tidak langsung.

2.2 Masyarakat

Menurut Elly M. Setiadi (2016:77) masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama.

Masyarakat setempat merupakan bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil, serta mereka lebih terikat dengan tempat. (Elly M. Setiadi, 2016:80).

Fairchild dalam Elly M. Setiadi (2016:76) unsur atau ciri-ciri masyarakat terdiri dari 5 yaitu:

1. Kelompok manusia
2. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama
3. Adanya pertahanan dan kekekalan diri
4. Adanya kesinambungan
5. Adanya hubungan yang pelik diantara anggotanya

Menurut Selo Soemardjan (dalam Jacobus Ranjabar, 2016:10) masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Selo Soemardjan (dalam Jacobus Ranjabar, 2016:10) mengatakan bahwa unsur-unsur masyarakat ada 4 yaitu :

1. Manusia hidup bersama. Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada.
2. Bercampur untuk waktu yang lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu system hidup bersama.

2.3 Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik atau pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan budaya itu baru akan berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negara.

Pembangunan merupakan perubahan yang disengajakan atau perubahan yang direncanakan secara sistematis, komprehensif (terpadu) dan menyatu (terintegrasi) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (M. Djadijono. 2016:242). Pembangunan berarti suatu proses rekayasa social maupun teknis (sosial and technical engineering), yang dimaksudkan sebagai tindakan interventif untuk mengatasi masalah dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan berarti suatu proses rekayasa social maupun teknis (sosial and technical engineering), yang dimaksudkan sebagai tindakan interventif untuk mengatasi masalah dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Manurut Haryono Sudriamunawar (2015:17) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta menentukan masukan- masukan yang menyeluruh, berkesinambungan dan merupakan

usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya Sudriamunawar (2015:15), pembangunan diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan dan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya.

Secara singkat dari pengertian tersebut bahwa pandangan atau pola pikir ilmu terhadap pembangunan pada dasarnya merupakan transformasi sosial masyarakat yang semula berorientasi ekonomi.

Pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditumpahkan oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building), (Sondang P Siagian, 2014:4).

2.4 Hubungan Partisipasi dengan Pembangunan

Pembangunan yang menyangkut pengertian bahwa manusia adalah objek dan subjek pembangunan. Karena manusia sebagai subjek pembangunan maka dia harus diperhitungkan. Oleh karena itu perlu mengajak subjek tadi berpartisipasi aktif dalam pembangunan sering kita mendengar bahwa pembangunan yang tidak dilaksanakan tidak mendapat sambutan rakyat, hal ini meminta pemimpin memiliki persepsi yang tajam dalam mendeteksi keinginan masyarakat.

Dalam pembangunan merupakan usaha masyarakat sebanyak mungkin ikut serta dalam pemerintah, memberi bantuan guna meningkatkan,

memperlancar, mempercepat dan menjamin keberhasilan pembangunan. Pemerintah juga harus sering menghimbau masyarakat karena keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi unsur masyarakat itu sendiri.

Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan masyarakat membutuhkan peran serta seluruh komponen yang dianggap mampu menggerakkan dan menumbuhkan kembangkan pembangunan yang berbasis partisipasi dengan kesesuaian dalam makna dan tujuannya. Peran serta masyarakat dan menempatkan kedudukan sebagai subjek pembangunan yang amat penting, hal ini erat kaitannya dengan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk memilih peranannya dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2.5 Desa

Asal kata “Desa” dari bahasa India yaitu “Swedesi” berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur, yang menunjuk pada suatu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas, (Amin Suprihatini, 2017:1). Sedangkan menurut Bintarto (dalam Amin Suprihatini, 2017:1) desa merupakan suatu hasil dan perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang dan hampir semuanya saling mengenal, (Bouman dalam Amin Suprihatini, 2017:2). Menurut Unang Sunardjo (dalam Amin Suprihatini, 2017:3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya

memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama- sama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menjalankan rumah tangga sendiri.

Menurut Unang Sunardjo dalam Amin Suprihatini (2017:3) unsur-unsur desa ada tiga tipe, yaitu :

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan teritorial atau wilayah tempat bersama sebagai dasar utama
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan atau genetik (suku,warga) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.6 Otonomi Daerah

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya

telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Sejalan dengan kehadiran Negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintah desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintah asli, undang- undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Spirit ini kemudian tercermin dalam hamper semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan desa.

Peraturan pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 Bab 6 Pasal 63 tentang perencanaan pembangunan desa yaitu:

1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

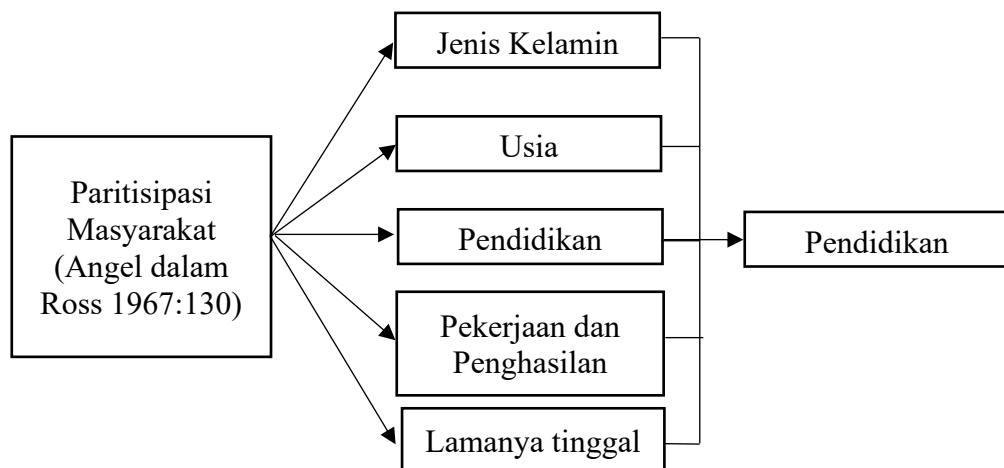
Dilihat dari PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa dan walaupun pemerintah yang membentuk peraturan namun hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk memajukan pembangunan desa.

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah desa telah diatur dalam Pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah serta sumber penerimaan sumber ketiga dan pinjaman desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) meliputi; hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2.7 Kerangka Berpikir

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yang inisiatifnya dari rakyat (bottom up) adalah aspek partisipasi. Partisipasi menurut kalangan aparat pelaksanaan pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintahan yang dirancang dan ditentukan tujuannya (loekman Sutrisno, 2007). Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan pembangunan harus ada jalinan kerja sama antara rakyat dan pemerintah, terutama dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Dengan keikutsertaan rakyat dalam pembangunan diharapkan memberikan hasil positif bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Angell dalam Ross (1967:130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. Waktu dilakukan penelitian ini pada bulan Mei – Juli tahun 2024

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan yang digunakan adalah Studi kasus (Deskriptif) tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau car akita memaknai suatu objek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar. Selain itu juga pendekatan penelitian ini juga merupakan gagasan realita sosial, fakta sosial dan menjadi masalah penelitian

3.3 Populasi

Sugiyono (2019:126) menjelaskan bahwa populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya.

3.4 Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu, sosial ekonomi antara lain usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal.
2. Data sekunder, adalah data yang penulis peroleh dari pihak instansi berupa laporan dan catatan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini yaitu, berupa keadaan geografis dan penduduk, keadaan sarana dan prasarana dan struktur organisasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan Triangulasi/gabungan. Gabungan dapat diartikan sebagai teknik dalam pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai satuan sumber data yang telah ada dengan teknik pengumpulan data.

1. Wawancara mendalam

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Pengumpulan data ini berdasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau pengetahuan pribadi.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi Metode penelitian ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta kendala-kendala dalam penganggaran dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil 3 penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Desa Salimbatu Kabupaten Bulungan.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.6 Validitas Data

Dalam penelitian ini, validitas data yang digunakan adalah:

a. Triangulasi

Triangulasi (Moleong, 2014) yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh

dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah:

- 1) Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan dikatakan informan dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanyadiperoleh dari satu sumber saja yaitu subyek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain seperti tetangga atau teman subyek,
- 2) Triangulasi metode, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan data hasil pengamatan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi ini merupakan alat pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Seperti data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat perekam untuk merekam hasil wawancara dengan informan. Sedangkan dalam uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, peneliti dalam membuat laporan harus memeberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut. Sehingga dapat memutuskan bisa atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengupayakan klasifikasi dan mengelompokan data sehingga dapat disamakan dan di bedakan. Pengumpulan Data Data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam setiap catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut dikumpulkan 24 dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

1. Reduksi Data (data Reduction)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau uraian yang rinci kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Di lapangan data yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian tentang Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Desa Salimbatu Kabupaten Bulungan reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informai ini termasuk didalamnya matrik, skema, table dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan.

Dengan penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan penelitian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (conclusions drawing and verification)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan makna dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna. Peneliti berupaya mencari makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Dalam proses penyimpulan data merupakan suatu proses yang membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-benar dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Syaprizal. 2008. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Skripsi.*

Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Pembangunan Masyarakat. Rineke Cipta : Jakarta*

Amin Suprihatini. 2007. *Pemerintah Desa dan Kelurahan, Cempaka Putih : Jakarta*

Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Pembangunan Masyarakat. Rineke Cipta : Jakarta*

Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan pembangunan daerah, PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta*

Sondang P. Siagian. 2000. *Administrasi pembangunan. Bumi Aksara : Jakarta*

Non Buku :

<http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat>

https://repository.uin-suska.ac.id/8978/1/2012_201211ADN.pdf

Perundangan dan Peraturan :

Undang-Undang Otonomi No 32 Tahun 2004, Sinar Garafika : Jakarta PP. No.

72 Tahun 2005 Tentang Desa